Jurnal PKM Manajemen Bisnis
Vol. 5, No. 1, January 2025

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

Interaksi antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kearifan Lokal: Menciptakan Harmoni dalam Pembangunan Kota

Andi Citrawali[1], Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng[2]
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
mtsp.41.3537@ipdn.ac.id[1], tjenreng@gmail.com[2]

Submitted: 18st Sept 2024 | **Edited**: 24th Dec 2024 | **Issued**: 01st January 2025

Cited on: Citrawali, A., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Interaksi antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kearifan Lokal: Menciptakan Harmoni dalam Pembangunan Kota. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis, 5*(1), 167-178.

ABSTRACT

Jakarta, currently undergoing a transition from its status as a Special Capital Region to the Special Region of Jakarta following the enactment of the DKJ Bill by the Indonesian House of Representatives on Thursday, March 28, 2024, will no longer serve as the nation's capital once the new National Capital City (IKN) is officially inaugurated. Jakarta, with its dynamic urban life, must continue to progress and develop to better serve and support its residents, ensuring a prosperous, safe, and peaceful life. The city's development should focus on human resource development based on local wisdom, considering its dense population, social complexity, and limited natural resources compared to other regions. Harmonious urban development can be achieved through positive interaction between the government and local wisdom, along with policies oriented toward social, cultural, and environmental sustainability. This approach aims to make Jakarta a livable and globally competitive city while preserving its unique cultural identity.

Keywords: Special Region of Jakarta, Local Wisdom, Community Participation

PENDAHULUAN

Kota Jakarta yang kini dalam masa transisi status kekhususannya dari Daerah Khusus Ibukota menjadi Daerah Khusus Jakarta setelah disahkannya RUU DKJ pada kamis 28 Maret 2024 oleh DPR RI sudah tidak berstatus sebagai ibukota negara setelah nantinya IKN diresmikan sebagai ibukota negara yang baru. Kota jakarta dengan segala kehidupan warganya harus tetap berjalan dan membangun diri menjadi semakin baik kedepannya dalam rangka mendukung dan melayani kehidupan warganya agar tercipta kehidupan yang sejahtera, aman dan damai. Kota jakarta sebagai kota yang sarat akan sejarah panjang perjuangan bangsa dan negara Indonesia memiliki modal atau sumber daya yang sangat besar dalam rangka menciptakan kehidupan yang harmoni bagi warganya, terutama sumber daya manusia / human capital. Bukan seperti daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki banyak kekayaan alam beserta isinya, pembangunan jakarta harus berfokus pada pembangunan sumber daya

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

manusia yang berbasis kearifan lokal. Jakarta memiliki luas daratan sekitar 664,01 km² dengan penduduk berjumlah 11.240.000 jiwa yang mobilitas masyarakatnya sangat tinggi dan sudah didukung oleh berbagai moda transportasi yang cukup lengkap dibandingkan dengan kota kota lainnya yang ada di indonesia menjadikan jakarta sebagai kota yang sangat padat dan kota tersibuk se indonesia selain surabaya, bandung, yogyakarta dan surakarta.

Dengan menjadi kota tersibuk di Indonesia serta ditunjang dengan berbagai moda transportasi yang ada, kota jakarta setelah nantinya tidak lagi menjadi ibukota Negara Republik Indonesia namun diproyeksikan untuk menjadi ibukota / pusat bisnis di Indonesia.

Pembangunan kota jakarta sebagai pusat bisnis nantinya harus lah memiliki prinsip pembangunan yang berkelanjutan memperhatikan aspek sosiologis, budaya serta kearifan lokal agar kota jakarta tetap memiliki identitas yang khas dan baik untuk dikenal oleh seluruh warga dunia. Pembangunan kota yang harmonis dapat tercipta dengan baik apabila pemerintah dapat berinteraksi baik dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah yang memperhatikan kebutuhan masyarakat serta pemerintah yang peduli terhadap lingkungan hidup. Adanya pemerintah itu berasal dari adanya negara yeng bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pentingnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta kearifan lokal dalam rangka melanjutkan pembangunan kota jakarta setelah tidak lagi berstatus ibukota negara diharapkan dapat menciptakan harmonisasi pembangunan kota menjadi tempat yang layak huni, nyaman, aman serta mendukung kehidupan masyarakat madani yang berkelanjutan.

Kearifan lokal memegang peranan penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai, tradisi, dan norma yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya, tetapi juga menjadi panduan etis dan modal sosial dalam membangun harmoni sosial dan mendukung perencanaan berbasis komunitas. Dalam konteks Jakarta, masyarakat Betawi memiliki tradisi seperti ***arisan, kerja bakti,*** dan ***ngopi bareng***, yang berfungsi sebagai sarana membangun hubungan sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat (*Geertz, 1963; Haryanto, 2020*). Tradisi ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai lokal dalam kebijakan pembangunan dapat

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

menciptakan rasa memiliki yang kuat di kalangan warga, sekaligus memperkaya pendekatan tata kelola perkotaan.

Perlibatan kearifan lokal dalam pembangunan kota juga menjadi perhatian utama dalam berbagai penelitian. *Suwandi (2018)* menyoroti bahwa perlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan pembangunan sekaligus melestarikan budaya lokal. Pemerintah daerah di berbagai wilayah telah mencoba menerapkan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya lokal. Di Jakarta, pemerintah provinsi telah mengesahkan ***Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi***. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan mengintegrasikan budaya Betawi ke dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk tata ruang, pariwisata, dan pendidikan. Namun, menurut *Putri dan Zulkarnain (2021)*, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya partisipasi aktif masyarakat adat dan minimnya koordinasi antar-lembaga terkait.

Selain itu, meskipun budaya Betawi telah diintegrasikan dalam promosi pariwisata melalui simbol-simbol seperti *ondel-ondel*, seni tradisional, dan kuliner khas, *Basuki (2019)* mengkritik bahwa perlibatan ini sering kali bersifat simbolis. Tidak ada upaya yang cukup signifikan untuk menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Hal ini menciptakan ketimpangan antara modernisasi yang terus berjalan dengan kebutuhan pelestarian budaya lokal. Konflik antara modernisasi dan tradisi menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan kota, seperti yang terlihat dalam kasus penggusuran Kampung Rawa. Menurut *Rachmawati (2020)*, penggusuran ini tidak hanya menghilangkan tempat tinggal masyarakat, tetapi juga menghapus jejak identitas budaya Betawi yang telah mengakar di kawasan tersebut.

Teori pembangunan, pendekatan *Participatory Urban Development (Friedmann, 1987)* menjadi salah satu model yang relevan untuk menciptakan harmoni antara pemerintah dan masyarakat lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi pembangunan. Di Jakarta, Program Kampung Deret adalah salah satu contoh upaya untuk melibatkan warga dalam revitalisasi lingkungan. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi permukiman tanpa menghilangkan ikatan sosial dan budaya masyarakat setempat. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

kurangnya dana, koordinasi yang buruk, dan resistensi dari sebagian masyarakat yang merasa tidak cukup dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Studi kasus dari kota-kota lain juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam pembangunan kota. Di Surabaya, program revitalisasi kampung berbasis budaya lokal, seperti *Kampung Lontong*, menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat menjadi daya tarik pariwisata sekaligus memperkuat identitas komunitas *(Mahendra, 2018)*. Di Yogyakarta, pelestarian tradisi Jawa tercermin dalam kebijakan tata ruang kota yang menghormati nilai-nilai lokal dan menjaga keseimbangan antara modernisasi dan budaya tradisional *(Widodo, 2019)*. Sementara itu, Bandung memiliki inisiatif "Kampung Kreatif" yang mengintegrasikan seni lokal dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal *(Sutrisno, 2020)*. Berdasarkan tinjauan literatur ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan kota yang harmonis sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Sinergi ini memerlukan pengakuan dan integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kebijakan pembangunan, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi, serta pendekatan adaptif yang dapat menyelaraskan modernisasi dengan pelestarian budaya. Jakarta memiliki potensi besar untuk mencapai harmoni ini, tetapi upaya yang lebih terkoordinasi dan inklusif masih diperlukan untuk mewujudkan visi pembangunan kota yang berkelanjutan dan berbasis pada nilai-nilai lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis interaksi antara pemerintah dan kearifan lokal dalam pembangunan Kota Jakarta. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika sosial, budaya, dan kebijakan yang relevan dengan konteks transisi Jakarta dari Daerah Khusus Ibukota menjadi Daerah Khusus Jakarta. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup berbagai sumber, seperti jurnal akademik, buku, kebijakan pemerintah, dan dokumen terkait lainnya. Analisis kebijakan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan, seperti Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi dan RUU Daerah Khusus Jakarta. Selain itu,

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

studi kasus digunakan untuk memberikan ilustrasi konkret mengenai integrasi kearifan lokal dalam pembangunan kota, seperti revitalisasi Kampung Betawi dan program Kampung Deret. Pendekatan deskriptif memungkinkan penelitian ini untuk mengungkapkan secara rinci potensi, tantangan, serta peluang dalam menciptakan pembangunan yang harmonis, berkelanjutan, dan berbasis pada nilai-nilai lokal.

PEMBAHASAN

Jakarta akan memasuki babak baru dari perjalanan panjang sejarahnya bermula dari pelabuhan kecil di estuari sungai Ciliwung sekitar 500 tahun yang lalu. Lambat laun, pelabuhan kecil ini bertransformasi menjadi pusat perdagangan internasional yang mempertemukan ragam bangsa di dunia. Rekam jejak Jakarta bisa ditemukan melalui beberapa prasasti yang ditemukan di sekitar pelabuhan dan sepanjang sungai Ciliwung. Sejarah tentang Jakarta tercatat oleh para pengembara Eropa di abad ke-16. Kala itu, Jakarta marak disebut sebagai Kalapa, yang merupakan pelabuhan utama kerajaan Sunda. Pelabuhan yang turut menjadi pusat perniagaan Portugis kala itu diserang oleh Pangeran Fatahillah pada 22 Juni 1527. Sejak itu, Pangeran Fatahillah mengganti nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta. Tanggal penyerangan itu hingga kini diperingati sebagai HUT Kota Jakarta.

Kemudian pada abad ke-16, VOC Belanda tiba dan mengambil alih kekuasaan atas Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia, yang diambil dari nenek moyang bansa Belanda, Batavieren. Kondisi geografis Batavia serupa dengan negara Belanda, sehingga pemerintah kolonial Belanda membangun kota dengan kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir seperti di Belanda. Pemerintah kolonial Belanda selanjutnya mendirikan pusat pemerintahan, dan memindahkannya ke daratan yang lebih tinggi dengan nama Weltevreden.

Batavia mulai menjadi pusat pergerakan nasional di awal abad ke-20 yang ditandai dengan Kongres Pemuda Kedua di tahun 1928. Sejak pendudukan Jepang di Indonesia akibat perang Dunia ke-II pada tahun 1942-1945, Batavia berganti nama menjadi Jakarta, atau Jakarta Tokubetsu Shi.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Jakarta menjadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan. Kemudian secara resmi pada tahun 1966 Jakarta menjadi Ibu Kota Negara. Sebagai Ibu Kota Negara,

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

Jakarta berkembang pesat dengan dibangunnya lokasi bisnis, akomodasi, hingga kedutaan besar bagi negara sahabat.

Jakarta terus berkembang menjadi megapolitan dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia dan kini statusnya akan berubah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara berganti status menjadi Daerah Khusus Jakarta. Kota Jakarta identik dengan Suku Betawi, yang merupakan suku asli Ibu Kota. Suku Betawi atau orang Betawi bermukim di Jakarta dan daerah-daerah penyanggahnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Dilansir laman resmi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Suku Betawi terbentuk pada abad ke-17, merupakan hasil dari campuran beberapa suku bangsa seperti Bali, Sumatera, China, Arab, dan Portugis. Jakarta, yang terletak di pinggir pantai atau pesisir, dalam proses perjalanan waktu menjadi kota dagang, pusat administrasi, pusat kegiatan politik, pusat pendidikan, dan disebut kota budaya.

Proses perkembangan itu amat panjang, sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Sejak masa itulah Jakarta menjadi arena perbauran budaya para pendatang dari berbagai kelompok etnis. Menurut para ahli, etnis Betawi lahir sebagai hasil perkawinan antar-etnis yang datang ke Jakarta dengan penduduk setempat pada abad ke-17. Etnis Betawi merupakan suku yang tingkat pernikahan antar-etnisnya paling tinggi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa untuk mencari orang Betawi cukup sulit. Masyarakat betawi yang hidup di ibukota adalah masyarakat yang egaliter yang terbuka dan dapat berdampingan dengan para pendatang dari etnis manapun.

Sinergi Kebijakan dan Kearifan Lokal dalam Pembangunan Kota Jakarta

Sinergi yang dimaksud adalah upaya mengintegrasikan nilai-nilai, pengetahuan, dan praktik tradisional yang telah diwariskan oleh masyarakat Jakarta (dalam hal ini, seringkali dikaitkan dengan budaya Betawi) ke dalam kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah mencapai pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan.

Contoh-Contoh Konkrit

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

   Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan urban tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga menjadi sarana melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Di Jakarta, revitalisasi kampung- kampung Betawi dapat menjadi contoh penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan RTH.

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

Kampung-kampung Betawi yang mempertahankan arsitektur tradisional dan ruang terbuka hijau seperti balai adat, taman komunitas, dan kebun tradisional mampu menjadi pusat aktivitas sosial masyarakat. Konsep ini tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal tetapi juga menciptakan lingkungan yang ramah terhadap masyarakat dan lingkungan.

Ruang terbuka hijau yang berbasis kearifan lokal dapat dirancang dengan mempertahankan elemen tradisional seperti pohon buah-buahan lokal yang dulunya menjadi ciri khas kampung Betawi. Selain itu, ruang ini dapat digunakan untuk menggelar aktivitas kebudayaan seperti lenong, gambang kromong, atau pasar tradisional mingguan. Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan RTH berbasis kearifan lokal, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengelolaannya.

Sebagai contoh, di Kampung Betawi Setu Babakan, ruang terbuka hijau tidak hanya digunakan untuk penghijauan tetapi juga sebagai ruang edukasi budaya dan sarana interaksi sosial. Studi dari Rachmawati (2020) menyoroti pentingnya pendekatan yang mengintegrasikan pelestarian budaya dengan pengelolaan lingkungan. Konsep serupa juga diterapkan di beberapa wilayah lain, seperti Surabaya dengan "Kampung Lontong" dan Bandung dengan inisiatif "Kampung Kreatif," yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus melestarikan budaya lokal.

2. Pelestarian budaya

Pelestarian budaya tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat identitas masyarakat dalam menghadapi tantangan modernisasi. Selain menggelar pertunjukan seni tradisional seperti lenong, gambang kromong, atau tari topeng Betawi, pelestarian budaya perlu diperluas ke dalam program pendidikan formal maupun informal. Salah satu upaya strategis adalah memperkenalkan bahasa Betawi sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah di Jakarta. Program ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga keberlangsungan bahasa Betawi yang terancam punah tetapi juga membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya melestarikan budaya lokal.

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pembuatan UU Daerah Khusus Jakarta (Draft Uji Publik 2 RUU Daerah Khusus Jakarta)

1. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Daerah

   Pasal 43 dari draft menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Khusus Jakarta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi ini mencakup penyampaian informasi kepada masyarakat, mendorong peran aktif kelompok dan organisasi masyarakat, serta mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan masyarakat terlibat secara efektif dalam kebijakan.
2. Peran Lembaga Musyawarah di Tingkat Kelurahan

   Lembaga Musyawarah Kelurahan (Pasal 38) dibentuk untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memberikan masukan kepada lurah terkait penyelesaian permasalahan lokal. Lembaga ini menjadi platform langsung bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memengaruhi keputusan di tingkat kelurahan.
3. Dewan Kota dan Kabupaten

   Dalam Pasal 37, Dewan Kota/Dewan Kabupaten bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada DPRD serta memberikan masukan kepada wali kota/bupati terkait penyelesaian berbagai isu lokal. Anggota dewan terdiri dari perwakilan masyarakat di setiap kecamatan, memastikan keterwakilan masyarakat di tingkat yang lebih tinggi.
4. Kebijakan Inovasi Berbasis Partisipasi

   Dalam Pasal 42, inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jakarta juga dapat berasal dari anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk memberikan masukan inovatif yang dapat memengaruhi kebijakan di tingkat daerah.
5. Penguatan Kebudayaan Melalui Keterlibatan Masyarakat

   Pasal 26 menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memajukan kebudayaan, termasuk melalui prioritas pada kebudayaan Betawi. Pemerintah daerah juga diamanatkan untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas dalam upaya pemajuan kebudayaan.

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

Keterlibatan masyarakat lokal dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan UU Daerah Khusus Jakarta dijamin melalui berbagai mekanisme, seperti partisipasi langsung di lembaga musyawarah, pengambilan keputusan berbasis komunitas, dan kontribusi dalam kebijakan inovasi serta kebudayaan. Upaya ini menunjukkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, pelestarian budaya dapat diwujudkan dengan memberikan dukungan konkret kepada komunitas seni tradisional Betawi. Dukungan ini mencakup pelatihan seni, penyediaan ruang berkesenian, hingga akses pendanaan yang memadai. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga swasta untuk menyelenggarakan festival seni tahunan yang melibatkan komunitas lokal, sehingga seni tradisional tidak hanya menjadi tontonan tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Studi Rachmawati (2020) menunjukkan bahwa komunitas seni tradisional memiliki peran vital dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal di tengah gempuran budaya populer.

Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pelestarian budaya. Misalnya, pembuatan aplikasi pembelajaran bahasa Betawi atau platform digital yang mendokumentasikan cerita rakyat, musik, dan tarian tradisional Betawi. Hal ini memungkinkan budaya lokal untuk diakses lebih luas, terutama oleh generasi muda yang akrab dengan teknologi. Survei Mahendra (2018) menunjukkan bahwa digitalisasi budaya tradisional mampu meningkatkan minat generasi muda dalam mempelajari seni dan bahasa lokal, sekaligus menciptakan inovasi berbasis budaya.

Pelestarian budaya yang terintegrasi dengan pendidikan, komunitas, dan teknologi akan menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan budaya Betawi. Dukungan kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tetap hidup dan relevan di masa mendatang.

Pembangunan kota jakarta tetap berfokus menjadi pusat bisnis sebagimana yang disampaikan oleh Ketua Bappenas Bambang Brodjonegoro “Jakarta masih akan tetap menjadi pusat kegiatan bisnis dan perekonomian sebagaimana saat ini. Selain itu, berbagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan ekonomi, misalnya Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tetap akan dipusatkan di Jakarta. Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis bahkan harus sudah menjadi pusat bisnis yang levelnya regional atau level Asia Tenggara”.

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

sebagai pusat bisnis kota jakarta tak dapat dipisahkan sebagai pusat hiburan karena fasilitas dan infrastruktur yang sudah memadai, oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah kota jakarta untuk melestarikan budaya lokal dan kearifan lokalnya dalam pembangunan kota jakarta agar dapat menjadi nilai tambah bagi pembangunan kota. Seperti daerah Bali yang menjadi salah satu pusat pariwisata dan pusat hiburan di Indonesia yang tetap menjaga dan mempertahankan budaya dan kearifan lokal sehingga menjadi daya tarik untuk para masyarakat lokal indonesia maupun masyarakat mancanegara untuk datang/mengunjunginya.

Satu di antara kewenangan khusus yang diatur pada UU DKJ ini yaitu berwenang untuk memajukan kebudayaan Betawi, tradisi, budaya kontemporer, dan budaya populer yang berkembang di wilayah Jakarta.

Hal itu sebagaimana termaktub pada pasal 31 UU DKJ yang berbunyi.

(1) Kewenangan Khusus di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf k meliputi:

a. prioritas pemajuan Kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta; dan
b. pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Kemudian, untuk mewujudkan kemajuan kebudayaan betawi, Daerah Khusus Jakarta berwenang membentuk Dana Abadi Kebudayaan yang bersumber dari APBD.

"Dalam rangka pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta membentuk Dana Abadi kebudayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," bunyi pasal 31 UU DKJ ayat 2. Selanjutnya, Pemprov DKJ juga dapat mengusulkan dana tambahan kepada Pemerintah Pusat. Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan Dana Abadi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.

Payung hukum berupa undang-undang mengenai kewajiban pemerintah kota jakarta untuk memprioritaskan kemajuan budaya betawi dan budaya lokal lainnya sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya dilapangan. Pemerintah kota jakarta dalam hal

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

ini tinggal melanjutkan saja pembangunan yang sudah berjalan seperti sebelumnya yang memasukkan kebudayaan betawi didalam unsur-unsur pembangunannya sebagai properti yang dapat menambah nilai value terhadap pembangunan kota jakarta. Bukan hanya aspek budaya betawi yang harus dikembangkan dan dimajukan oleh pemerintah kota jakarta, aspek sumber daya manusia betawi pun harus juga turut dikembangkan dan dimajukan. Sebagai suku asli penduduk kota jakarta masyarakat suku betawi haruslah dapat menerima pendidikan yang layak bahkan dapat menerima pendidikan yang tinggi seharusnya dengan bantuan dan support kebijakan pemerintah kota jakarta agar dapat bersaing dengan warga lainnya yang datang dari luar kota bahkan luar negeri. Masyarakat betawi dengan budaya dan kearifan lokalnya diharapkan dapat menjadi tuan rumah dinegeri / kota sendiri. Masyarakat suku betawi yang terdidik dan terpelajar dengan kearifan lokalnya yang bersifat egaliter dan mudah beradaptasi serta islamis dapat menjadi tokoh utama pembangunan kota jakarta dengan dukungan pemerintah kota.

Pembangunan kota yang memperhatikan dan mengikutkan partisipasi masyarakat lokal dengan pemerintahan akan dapat menciptakan harmonisasi dalam mewujudkan masyarakat kota yang madani dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Jakarta yang tidak lagi berstatus ibukota negara dalam pembangunan kotanya diharapkan dapat lebih memprioritaskan pembangunan kota yang berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya demi terwujunya kehidupan masyarakat madani. Pemerintah kota jakarta dapat melanjutkan dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat serta kearifan lokal sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang daerah khusus jakarta demi terciptanya harmoni pembangunan kota.

DAFTAR PUSTAKA

Basuki, A. (2019). Kritik terhadap Pelestarian Budaya Betawi di Jakarta: Antara Simbolisme dan Implementasi. Jurnal Kebudayaan dan Perkotaan, 7(3), 45-58.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research (5th ed.). SAGE Publications.

e-ISSN 2797-8338
DOI 10.37481

Draft Uji Publik 2 RUU Daerah Khusus Jakarta

Friedmann, J. (1987). Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action. Princeton University Press.

Geertz, C. (1963). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. Basic Books. Haryanto, D. (2020). Kearifan Lokal sebagai Basis Pembangunan Sosial di Jakarta. Jurnal Sosiologi Indonesia, 12(2), 101-120.

Mahendra, T. (2018). Revitalisasi Kampung Lontong di Surabaya: Studi Kasus Pelestarian Budaya Lokal melalui Pariwisata. Jurnal Pariwisata Nusantara, 10(1), 20-35.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Putri, R., & Zulkarnain, A. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 67-82.

Rachmawati, S. (2020). Dampak Penggusuran Kampung Tradisional terhadap Identitas Budaya Lokal di Jakarta. Jurnal Urbanisme dan Budaya, 5(1), 12-25.

Setiawan, Y., & Arifin, B. (2017). Green Infrastructure dan Peranannya dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota. Jurnal Perkotaan dan Lingkungan, 9(2), 15-28.

Suwandi, M. (2018). Kearifan Lokal dalam Pembangunan Kota Berbasis Partisipasi. Jurnal Perencanaan Kota dan Wilayah, 15(2), 80-95.

Sutrisno, A. (2020). Kampung Kreatif di Bandung: Integrasi Seni Lokal dalam Pembangunan Ekonomi. Jurnal Ekonomi Kreatif, 8(3), 40-53.

Widodo, H. (2019). Pelestarian Tradisi Jawa dalam Tata Ruang Kota Yogyakarta. Jurnal Perencanaan Tata Ruang, 6(1), 34-48.